

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* TERHADAP SYARAT
KEWAJIBAN LHKPN BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF
TERPILIH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh :

Rizka Amaliatus Syafa'ah

NIM : 05020420047



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Uin Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Amaliatus Syafa'ah
NIM : 05020420047
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Analisis *Fiqh Siyāsah* Dustūriyyah Terhadap Syarat Kewajiban LHKPN Bagi Calon Anggota Legislatif Terpilih Dalam Upaya Pencegahan Korupsi.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Rizka Amaliatus Syafa'ah
NIM. 05020420047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizka Amaliatus Syafa'ah
NIM. : 05020420047
Judul : Analisis Hukum Positif dan *Fiqh Siyāsah* Terhadap
Syarat Kewajiban LHKPN Bagi Calon Anggota
Legislatif Terpilih Dalam Upaya Pencegahan Korupsi.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 Januari 2024
Pembimbing,



Ibnu Mardiyanto, S. Mn., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizka Amaliatus Syafa'ah

NIM. : 05020420047

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

NIP. 198703152020121009

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji II



Drs. Jeje Abdul Roiak, M.Ag.

NIP. 196310151991031003

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 22 Februari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sujinah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizka Amaliatus Syafa'ah
NIM : 05020420047
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik (Hukum Tata Negara)
E-mail address : rizkasyafaah380@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Syarat Kewajiban LHKPN Bagi Calon Anggota Legislatif Terpilih Dalam Upaya Pencegahan Korupsi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2024

Penulis

(Rizka Amaliatus Syafa'ah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Adanya beberapa nama calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan polemik tersendiri dalam kontestasi pemilu 2024. Selain itu, dihilangkannya pasal terkait kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang notabene merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi sebagai syarat pelantikan calon anggota legislatif terpilih juga menjadi penunjang akan protes masyarakat terhadap aturan terbaru yang dikeluarkan oleh KPU. Bersumber dari adanya permasalahan tersebut, ada dua topik utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama yakni urgensi dari adanya persyaratan kewajiban LHKPN bagi calon anggota legislatif terpilih. Kedua, yakni pandangan *fiqh siyāsah dustūriyah* mengenai adanya syarat kewajiban LHKPN bagi calon anggota legislatif terpilih sebagai salah satu upaya dalam pencegahan korupsi.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research*, baik dari sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang fokusnya pada konsep *good governance* dan undang-undang tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model induktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa urgensi dari adanya syarat kewajiban LHKPN bagi calon anggota legislatif terpilih yakni meningkatkan tingkat kepatuhan lembaga legislatif akan adanya kewajiban LHKPN, yang memang sebelumnya dalam lima tahun terakhir merupakan lembaga dengan presentase tingkat kepatuhan terendah dalam kepatuhan pelaporan LHKPN. Selain itu masih tingginya presentase korupsi di lembaga legislatif menjadikan perlunya upaya pencegahan dan penanganan berupa LHKPN sebagai alat *controlling*. Keberlakuan LHKPN sebagai suatu aturan *controlling* tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan suatu negara. Sedangkan dalam ranah *fiqh siyāsah*, kebijakan aturan LHKPN sesuai dengan adanya konsep *riqābatul ummah* yang merupakan representasi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dan kemaslahatan.

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil penelitian tersebut yakni: Pertama, diharapkan pemerintah atau utamanya KPU mencantumkan kembali syarat LHKPN pada peraturan terbaru guna meningkatkan kualitas pemilihan dan memaksimalkan upaya pencegahan korupsi melalui pemberlakuan LHKPN. Kedua, perlu dibentuk aturan atau sanksi yang lebih tegas terkait ketidakpatuhan LHKPN guna meningkatkan presentase kepatuhan pelaporan LHKPN. Utamanya aturan sanksi ketidakpatuhan LHKPN yang dikhususkan untuk lembaga legislatif, baik itu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun DPD.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KORUPSI DAN KONSEP PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA DENGAN KORELASI TEORI KEPATUHAN HUKUM, GOOD GOVERNANCE, DAN FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH	23
A. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	23
1. Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi	23
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi	26
3. Upaya-Upaya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	29
B. Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia	30
1. Pengertian, Tujuan, dan Konsep Dasar Pemilihan Umum Legislatif	29
2. Persyaratan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2024	31

C.	Teori Kepatuhan Hukum dan Asas <i>Good Governance</i> dalam Pemberlakuan Suatu Aturan Hukum	33
1.	Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	33
2.	Teori Asas <i>Good Governance</i>	36
3.	Mengenal Aturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi.....	38
D.	Konsep <i>Fiqh Siyāsah</i> dalam Hukum Islam.....	39
1.	Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	39
2.	Konsep Dasar <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> dan Lembaga Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam	41
 BAB III URGNESI PERSYARATAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH.....		45
A.	Penerapan Aturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Indonesia	45
B.	Rendahnya Tingkat Presentase Kepatuhan Lembaga Legislatif dalam Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	51
C.	Persyaratan Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Calon Anggota Legislatif Terpilih.....	54
 BAB IV PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH MENGENAI SYARAT KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI		64
A.	Pandangan Hukum Positif dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> dan Pencegahan Korupsi di Indonesia	64
B.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sebagai Sarana Perwujudan <i>Riqābatul Ummah</i> dalam Konsep <i>Fiqh Siyāsah Dustūiyyah</i>	70
 BAB V PENUTUP.....		82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran.....	83
 DAFTAR PUSTAKA		84
 LAMPIRAN		

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Dj, Yusrizal. "Tindakan Preventif Pemberantasan Korupsi Dalam Prespektif Islam." *Menara Ilmu* 13, no. 2 (2019).
- Karim, Abdul. *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Kristianto, Jusuf. *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Lathif, Nazaruddin, Mustika Wijaya, and Muhammad Mihradi. *Hukum Administrasi Negara*. 1. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, 2021.
- Lubis, Ali Akhbar. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. 1. Yogyakarta: Ircisod, 2017.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. 1. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Perdana Putra, Risqi. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ragawino, Bewa. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, 2006.
- Ramadhana, Kurnia, Seira Tamara, and Yassar Aulia. *Kajian Urgensi Penguatan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan: Studi Kasus Kepatuhan LHKPN Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI Periode 2019-2024*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023.
- Sasongko, Warso. *Korupsi*. Relasi Inti Media Grup, 2017.
- Solikhudin, Muhammad. *Good Governance (Mengurai Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Pendekatan Maqasid al Shariah)*. 1. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Taufik, Mohammad. *Hukum Kebijakan Publik Teori Dan Praktis*. 1. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2022.

Tim SPORA. *Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*. 1. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepuyan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015.

Tri Dwi Sulisworo, Dikdik Wahyuningsih, and Baegaqi Arif. *Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012.

Umar, Nasaruddin. *Teologi Korupsi*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2019.

Jurnal

Agus, Gustiar. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif (Studi Analisis UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD)." *UIN Suska Riau* (2019): 36–40.

Ahmad, Jumal. "Analisa Pengaruh Al-Qawaid Al-Ushuliyah Dan Fiqhiyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqih (Kasus Hukuman Untuk Tindak Pidana Korupsi)." *Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2017).

Antari, Putu Eva Ditayani. "Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (July 5, 2018): 87–104.

Arifuddin, Baso, and Mustari. "Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo." *UNM Online Journal Systems* 1, no. 1 (2014).

Candra, Anton. "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah." *UIR LAW RIVIEW* 1, no. 2 (2017): 167.

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Quran." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017). <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/59/42>.

Gabriela, Debby Telly, and Herlianti Yuliana. "Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Administratum* 11, no. 4 (n.d.).

Harmono, Dwi, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, and Muhammad Junaidi. "Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (December 11, 2020): 296.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18.

- Luhuringbudi, Teguh, and Achmad Yani. "Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqih (Kasus Hukuman Tindak Pidana Korupsi)." *Jurnal Al Izza* 13, no. 1 (2018).
- Merliani, Selfi. "Pandangan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Strategi Pelaksanaan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020): 23.
- Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Prespektif Al-Quran." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 2, no. 1 (April 1, 2017). Accessed October 17, 2023. <http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/59>.
- Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Terciptanya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme)." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2019).
- Nur, Ahmad. "Islam Komunikatif Berbasis Indonesia Kritis Atas Gerakan Islam Inklusif Dan Eksklusif Di Indonesia." *FTK UIN Sunan Ampel Surabaya*. 1 (2015).
- Putri, Dwina. "Korupsi dan Prilaku Koruptif." *Jurnal Tarbiyah bil Qalam* 5, no. 2 (2021). Accessed November 19, 2023. <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/68>.
- Qoroni, Wasol, and Indien Winawarti. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konsteks Demokrasi Di Indoensia." *Journal Turnojoyo* 2, no. 1 (June 2021): 55.
- Rasaili, Wilda. "Kinerja DPR Dan Kepercayaan Publik (Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019)." *Jurnal Wiraraja* (n.d.): 12.
- Rasul, Sjahrudin. "Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009). <https://media.neliti.com/media/publications/40550-ID-penerapan-good-governance-di-indonesia-dalam-upaya-pencegahan-tindak-pidana-koru.pdf>.
- Rofitasari, Syelladita. "Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru* (2021).
- Safrijal, Nasir Basyah, and Hasbi Ali. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara

Kabupaten Aceh Selatan.” *Jurnal Umliah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1, no. 1 (2016).

Samsu, La. “Al-Sultah Al-Tasri’iyyah, AL-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada’iyyah.” *Jurnal Tahkim* 13, no. 1 (2017).

Setiawan, Rahmat. “Tinjauan Yuridis Terhadap Calon Legislatif Yang Tidak Melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.” *Universitas Dharmawangsa* (2019).

Sihombing, Miracle. “Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.” *Universitas Brawijaya* (2013): 13.

Website

Aditya, Nicholas. “Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR Stabil, Stabilitasnya Rendah.” *Kompas.Com*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/02/17170791/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-stabil-stabilitnya>.

Alfons, Matius. “Di Depan DPR, KPK Ungkap Data LHKPN Lembaga Legislatif Terendah.” *DetikNews*, January 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5915777/di-depan-dpr-kpk-ungkap-data-lhkpn-lembaga-legislatif-terendah>.

Ayu, Monavia. “Daftar 39 Caleg Mantan Koruptor Dalam Pemilu 2024.” *DataIndonesia.id*, *DataIndonesia.Id*, agustus 2023. Accessed November 10, 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/daftar-39-caleg-mantan-koruptor-dalam-pemilu-2024>.

Bintang, Ananda. “Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 : Indeks Presepsi Korupsi Indonesia Periode Kedua Jokowi 2019-2022.” *Tempo*, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1807138/hari-antikorupsi-sedunia-2023-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-periode-kedua-jokowi-2019-2022>.

Christa Auli, Renata. “Bentuk-Bentuk Korupsi Dan Aturannya Di Indoensia.” *Hukum Online*, 2022. Accessed November 20, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a>.

Fenaka, Andrean W. “Faktor Eksternal Orang Melakukan Korupsi.” *Indoensiabaik.Id*, 2019. Accessed November 19, 2023.

<https://indonesiabaik.id/infografis/faktor-eksternal-orang-melakukan-korupsi>.

Finaka, Andrean W. "Tahapan Dan Jadwal Pemilu 2024." *Indoensiabaik.Id*, 2022. Accessed November 10, 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/tahapan-dan-jadwal-pemilu-2024>.

Ibnu Sahroji, Muhammad. "5 Prinsip Dasar Sistem Pemerintahan Dalam Ketatanegaraan Islam Prespektif KH. Affifuddin Muhajir." *Islam.nu.or.id. Nuonline*, February 2023. Accessed November 17, 2023. <https://islam.nu.or.id/syariah/5-prinsip-dasar-sistem-pemerintahan-dalam-ketatanegaraan-islam-perspektif-kh-affifuddin-muhajir-OpRuI>.

Muhammad, Nabila. "KPK Terima 2.707 Laporan Dugaan Korupsi Pada Semester I 2023, Terbanyak Dari Ibu Kota." *Databoks*, n.d. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota>.

Narda, Rahel, and Bagus Santosa. "KPK: Perlu Penyempurnaan Regulasi Pengaturan Sanksi Bagi Pejabat Negara Yang Tak Patuh LHKPN." *Kompas.Com*, March 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/07/14405291/kpk-perlu-penyempurnaan-regulasi-pengaturan-sanksi-bagi-pejabat-negara-yang>.

Santika, Erlina. "Banyak Anggota DPR Tak Patuh LHKPN, Ini Partai Politiknya." *Databoks*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/18/banyak-anggota-dpr-tak-patuh-lhkpn-ini-latar-partai-politiknya>.

Sigit, Bagus. "Demonstrasi Dalam Islam," 2012. <https://bagussigit.wordpress.com/>.

Aditya, Nicholas. "Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR Stabil, Stabilitasnya Rendah." *Kompas.Com*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/02/17170791/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-stabil-stabilitasnya>.

Alfons, Matius. "Di Depan DPR, KPK Ungkap Data LHKPN Lembaga Legislatif Terendah." *DetikNews*, January 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5915777/di-depan-dpr-kpk-ungkap-data-lhkpn-lembaga-legislatif-terendah>.

Ayu, Monavia. "Daftar 39 Caleg Mantan Koruptor Dalam Pemilu 2024." *DataIndonesia.id. DataIndonesia.Id*, Agustus 2023. Accessed November 10, 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/daftar-39-caleg-mantan-koruptor-dalam-pemilu-2024>.

- Bintang, Ananda. "Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 : Indeks Presepsi Korupsi Indonesia Periode Kedua Jokowi 2019-2022." *Tempo*, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1807138/hari-antikorupsi-sedunia-2023-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-periode-kedua-jokowi-2019-2022>.
- Christa Auli, Renata. "Bentuk-Bentuk Korupsi Dan Aturannya Di Indoensia." *Hukum Online*, 2022. Accessed November 20, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a>.
- Fenaka, Andrean W. "Faktor Eksternal Orang Melakukan Korupsi." *Indoensiabaik.Id*, 2019. Accessed November 19, 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/faktor-eksternal-orang-melakukan-korupsi>.
- Finaka, Andrean W. "Tahapan Dan Jadwal Pemilu 2024." *Indoensiabaik.Id*, 2022. Accessed November 10, 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/tahapan-dan-jadwal-pemilu-2024>.
- Ibnu Sahroji, Muhammad. "5 Prinsip Dasar Sistem Pemerintahan Dalam Ketatanegaraan Islam Prespektif KH. Affifuddin Muhajir." *Islam.nu.or.id. Nuonline*, February 2023. Accessed November 17, 2023. <https://islam.nu.or.id/syariah/5-prinsip-dasar-sistem-pemerintahan-dalam-ketatanegaraan-islam-perspektif-kh-afifuddin-muhajir-OpRuI>.
- Muhammad, Nabila. "KPK Terima 2.707 Laporan Dugaan Korupsi Pada Semester I 2023, Terbanyak Dari Ibu Kota." *Databoks*, n.d. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota>.
- Narda, Rahel, and Bagus Santosa. "KPK: Perlu Penyempurnaan Regulasi Pengaturan Sanksi Bagi Pejabat Negara Yang Tak Patuh LHKPN." *Kompas.Com*, March 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/07/14405291/kpk-perlu-penyempurnaan-regulasi-pengaturan-sanksi-bagi-pejabat-negara-yang>.
- Santika, Erlina. "Banyak Anggota DPR Tak Patuh LHKPN, Ini Partai Politiknya." *Databoks*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/18/banyak-anggota-dpr-tak-patuh-lhkpn-ini-latar-partai-politiknya>.
- Sigit, Bagus. "Demonstrasi Dalam Islam," 2012. <https://bagussigit.wordpress.com/>.
- Wicaksono, Adhi. "55 Anggota DPR Dilaporkan Ke MKD Karena Tak Patuh Laporan LHKPN." *CNN Indonesia*, 2023.

- “Anggota Dewan Paling Banyak Dicidaduk KPK.” *Katadata.Co.Id*, 2019.
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a551440881/anggota-dewan-paling-banyak-dicidaduk-kpk>.
- “Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Mematuhinya.”
 Rcs.hukumonline.com. *Hukum Online*, 2022.
<https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.
- “Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023.”
 kpk.go.id, 2023. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhkpn/menu-kepatuhan-lhkpn>.
- “Laporan Akhir Tahun ICW 2022.” Antikorupsi.org. *Indonesia Corruption Watch*,
 n.d.
- “Laporan Tahunan KPK Tahun 2018.” kpk.go.id, 2018.
<https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LaporanTahunanKPK/Laporan-Tahunan-KPK-2018-.pdf>.
- “Laporan Tahunan KPK Tahun 2019.” kpk.go.id, 2019.
<https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan-Tahunan-KPK-2019-Bahasa.pdf>.
- “Laporan Tahunan KPK Tahun 2020.” kpk.go.id, 2020.
https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan_Tahunan_KPK_2020.pdf.
- “Laporan Tahunan KPK Tahun 2022.” kpk.go.id, 2022.
- “LHKPN Sebagai Ukuran Transparansi Penyelenggara Negara.”
Bkppd.Gunungkidulkab.Go.Id, 2021.
<https://bkppd.gunungkidulkab.go.id/post/Zk00ZIZUS2kxNTNpTWkydllwbEIUZz09>.
- “Pelaporan Kekayaan Pejabat BUMD Sangat Rendah.” *Media Indonesia*, 2021.
<https://epaper.mediaindonesia.com/detail/pelaporan-kekayaan-pejabat-bumd-sangat-rendah>.
- “Presentase Golput Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden, 1971-2019,” n.d.
- “Rombak Ulang Komposisi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI : 12 Anggota Tidak Patuh LHKPN.” Antikorupsi.org. *Indonesia Corruption Watch*, 2023.
<https://antikorupsi.org/id/rombak-ulang-komposisi-mahkamah-kehormatan-dewan-dpr-ri-12-anggota-tidak-patuh-lhkpn>